

BAB II

Gambaran Umum Objek Penelitian

Bagian barat laut dari wilayah Kabupaten ini berupa pengunungan yaitu bukit Menoreh dengan puncak Suroloyo yang memiliki ketinggian 1019 m dengan perbatasan dengan Kabupaten Magelang, dan bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga ke kawasan pantai, Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa pantai yaitu Congot, pantai Glagah yang terletak 10 km dari bagian barat daya Kota Wates atau 35 km dari pusat Kota Yogyakarta dan pantai Trisik.

Daerah yang saat ini masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo hingga berakhirnya Pemerintahan kolonial Hindia Belanda merupakan wilayah dua Kabupaten, yakni Kabupaten Kulon Progo yang merupakan kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarto yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman kedua Kabupaten ini digabungkan dalam administrasinya sehingga menjadi satu Kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober 1951. Sebelum perang Diponegoro di daerah Negaragung termasuk dalam wilayah Kulon Progo selma terjadinya peperangan tersebut belum ada pejabat Pemerintah yang menjabat di daerah sebagai penguasa, pada waktu itu roda Pemerintahan dijalankan oleh pepatih dalem yang memiliki kedudukan di Ngayogyakarta Hadinigrat setelah perang Diponegoro tahun 1825-1830 di wilayah Kulon Progo yang sekarang masuk di dalam kawasan kasultanan terbentuk menjadi empat Kabupaten yakni, Kabupaten Pengasih, tahun 1831, Kabupaten Sentolo, tahun 1831, Kabupaten Nanggulan, tahun 1851, Kabupaten Kalibawang, tahun 1855.

Masing-masing dari Kabupaten tersebut dipimpin oleh seorang Tumenggung, pada tahun 1912, Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo dengan Ibukota di Pengasuh, Bupati pertama yang

menjabat yaitu Raden Tumenggung Poerbowinoto. Sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua Kawedanan dengan delapan kapanewon sedangkan ibukotanya dipindahkan ke sentolo.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo.

A. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, Bupati Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu.

B. Visi & Misi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo

1. Visi

1. Terwujudnya penanaman modal yang berdaya saing berwawasan global, serta pelayanan perizinan yang prima.

2. Misi

1. Mewujudkan peningkatan daya saing daerah
2. mewujudkan pelayanan prima perizinan.

3. Tugas pokok fungsi

1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, menerapkan kebijakan teknis, melaksanakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta apa saja bahan-bahan lainnya yang bersangkutan dengan perizinan terpadu.

2. Menyusun dan melaksanakan mengendalikan program kerja seksi
3. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis perizinan terpadu.
4. Menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan perizinan.
5. Melaksanakan penerimaan pengajuan permohonan perizinan dan penyerahan izin.
6. Melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan.
7. Menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan administrasi pelayanan perizinan
8. Menyiapkan pelayanan legalisasi perizinan.
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi.

C. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten

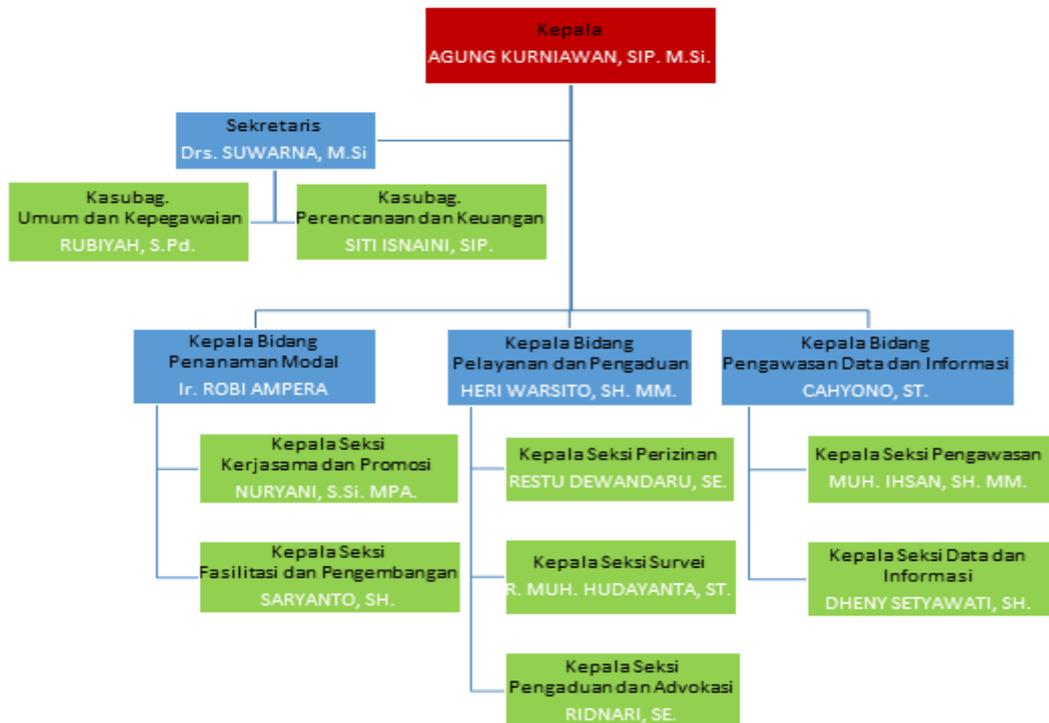
Kulon Progo yaitu :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 2. Sub Bagian perencanaan dan keuangan.
- c. Kepala bidang penanaman modal yang terdiri dari :
 1. Seksi kerjasama dan promosi
 2. Seksi fasilitas dan pengembangan
- d. Kepala bidang pelayanan dan pengaduan yaitu :
 1. Seksi perizinan
 2. Seksi survei

3. Seksi pengaduan dan advokat
- e. Kepala bidang pengawasan data dan informasi yaitu :
1. Seksi pengawasan
 2. Seksi data dan informasi.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 66 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi dan tugas serta tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kulon Progo :

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DPMPT



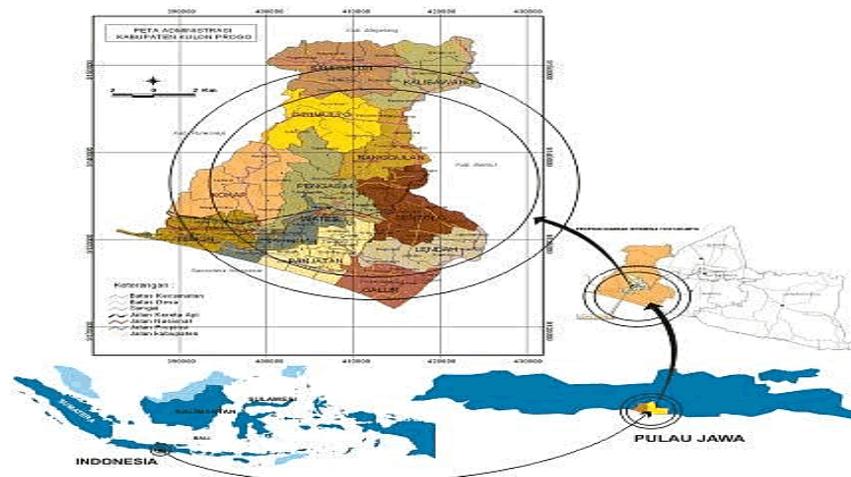
(Sumber Data: <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/pages-9-visi-misi-dan-tupoksi.html>)

D. Kondisi Letak & Geografis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten dari lima Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak dibagian barat, Kabupaten Kulon Progo berbatasan dengan timur Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di bagian sebelah Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, bagian sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Kabupaten Kulon Progo dengan ibu Kota Wates memiliki luas wilayah seluas 58.627,512 ha (586,28 km²), terdiri dari 12 Kecamatan 87 Desa, 1 Kelurahan dan 917 dukuh.

Kabupaten Kulon Progo dapat dilewati oleh 2 (dua) prasarana perhubungan yang merupakan perlintasan nasional di Pulau Jawa yakni jala Nasional sepanjang 28,57 km dan terdapat jalur kereta api kurang lebih 25 km, hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dijangkau dengan menggunakan jalan transportasi darat.

Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kulon Progo



(Sumber Data BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo)

Batasan luas Wilayah Kabupaten Kulon Progo terletak pada :

1. Barat : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
2. Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul Provinsi D. I. Yogyakarta.
3. Utara : Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
4. Selatan : Samudera Hindia.

Sedangkan luas batas Topografi Kabupaten Kulon Progo yaitu :

1. Barat : 1100 Bujur Timur/E, Longitude 1'37"
2. Timur : 1100 Bujur Timur/E, Longitude 16'26"
3. Utara : 70 Lintang Selatan/S, Latitude 38'42"
4. Selatan : 70 Lintang Selatan/S, Latitude 59'3"

Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi dengan ketinggian antara 0-1000 meter dari atas permukaan air laut yang memiliki 3 wilayah yaitu :

1. Bagian Utara

Yang merupakan dataran tinggi atau perbukitan yang memiliki ketinggian 500-1000 meter dari atas permukaan air laut, Kecamatan Grimulyo, Kokap, Kalibawang, Samigaluh, dari wilayah tersebut di gunakan sebagai kawasan budidaya konservasi dan kawasan ini memiliki rawan bencana yaitu tanah longsor.

2. Bagian Tengah

Dibagian Tengah merupakan bagian perbukitan yang memiliki ketinggian yaitu 100-500 meter dari atas permukaan air laut, yang melinggari Kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pengasih, dan Lendah, dari Kecamatan tersebut memiliki lereng yaitu 2,15% yang memiliki gelombang yang dapat menjadi tempat peralihan dataran rendah.

3. Bagian Selatan

Bagian selatan yaitu bagian yang terdapat dataran rendah dengan ketinggian yaitu 0-100 meter dari atas permukaan air laut yang mengelilingi Kecamatan yaitu Temon, Wates, Panjatan, Galur, dari Kecamatan tersebut memiliki kemiringan lahan dan memiliki lereng yaitu 0,2%, yang merupakan wilayah pantai yang memiliki luas 24,9 km apabila masuk musim penghujan kawasan tersebut rawan mengalami banjir.

Kabupaten Kulon Progo memiliki peluang dan investasi yaitu:

1. Kawasan peruntukan industri

Kawasan industri ini dipergunakan untuk menampung segala kegiatan yang berkaitan dengan peluang dan investasi yang pematangan tanah dan penyedia sarana dilakukan oleh pengusaha, kawasan tersebut yaitu :

- a. Industri besar.

Kawasan industri besar di Kabupaten Kulon Progo terdapat di Kecamatan Sentolo yang berdekatan dengan Desa Banguncipto, Desa Sentolo, Desa Sukoreno, Desa Salamrejo, Desa Tuksono, ada juga Kecamatan Lendah yang memiliki potensi industri bahari yang meliputi Desa Ngentakrejo, Desa Gulurejo, dan Kecamatan Temon.

- b. Industri mikro

1. Industri pangan

Indutri ini terdapat di daerah Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, Sentolo, Pengasih, Kokap, Grimulyo, hingga Kalibawang.

2. Industri sandang dan kulit.

Industri ini terdapat di daerah Kecamatan Temon, Wates, Lendah, Sentolo, Nanggulan, Kalibawang.

3. Industri kimia dan bangunan

Industri ini terdapat di Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Sentolo, Pengasih, Kokap dan Grimulyo.

4. Industri logam

Industri ini terdapat di Kecamatan Wates.

5. Industri kerajinan

Industri ini meliputi seluruh wilayah Kulon Progo.

2. Bandara Internasional

Bandara Internasional Kulon Progo atau di sebut NYIA (New Yogyakarta Internasional Aiport) merupakan program pembangunan *project Book* Bappenas tahun 2010-2014, Bandara Kulon Progo terletak 30 km dari sebelah barat dari Kota Yogyakarta, memiliki runway 3.600 meter, landasan yang dimiliki bandara NYIA ini sangat memadai untuk pesawat yang berukuran cukup besar dan memiliki taraf internasional.

3. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto

Pelabuhan yang dibangun ini terletak di Desa Karangwuni Kecamatan Wates yang memiliki luas 83 Ha, pelabuhan ini memiliki aksesibilitas yang baik, pelabuhan ini dibangun bertujuan untuk menghubungkan dengan bagian jawa selatan peluang investasi yang ada di pelabuhan Adikarto yaitu pengalengan ikan, tepung tulang ikan, ikan beku, ikan asap, industri perkapalan, industri alat tangkap ikan, pabrik es, maupun penyediaan air bersih.

Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkatan perekonomian yang bisa berpengaruh besar, Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki sumber daya alam yang bisa dikatakan cukup banyak dari data yang di peroleh dari BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo terdapat kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun

sebelumnya, realisasi PAD Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2010 sebesar Rp. 48,190,801,571,16. Yang terdiri dari pajak Daerah sebesar Rp. 4.310.294,480,42, retribusi Daerah Rp. 7.727,507,308,00 dan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 4,740,517,850,30 serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 31,412,481,932,44. PAD Tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp. 8,832,172,1600,06 atau 22,44 %, sedangkan dana perimbangan tahun 2010 sebesar Rp. 485,094,125,372. Nilai produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 sebesar 3,55 triliun rupiah dengan jumlah penduduk sebesar 388,869 jiwa, perkapita sebesar Rp. 9,121,466.

Rencana tata ruang dan wilayah, wilayah Kabupaten Kulon Progo seperti yang telah ditetapkan dalam PERDA No. 1 Tahun 2003 tentang rencana tata ruang dan wilayah Daerah tahun 2003-2013 sesuai dengan hirarkinya, Kabupaten Kulon Progo dijelaskan sebagai, Hirarki I yang merupakan daerah Wates yang meliputi sebagian Kecamatan dan sebagian Kecamatan Pengasih sebagai pusat kegiatan untuk melayani seluruh Wilayah Kabupaten yang berada di bawahnya yang direncanakan melalui :

1. Pemantapan keterkaitan dengan kota-kota hirarki II dan III serta kota-kota pada wilayah perbatasan dengan peningkatan sarana dan prasaranan perhubungan darat untuk memperlancarkan arus lalu lintas
2. Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat.
3. Memanfaatkan fungsi kota sebagai penahan arus urbanisasi dan migrasi penduduk untuk keluar daerah.

4. Peningkatan penataan ruang kota dan penataan bangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian oleh semua pihak.
5. Pengembangan sektor perekonomian dan sektor perdagangan melalui pengembangan, pembinaan pengusaha menengah kecil dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk.
6. Meningkatkan peran sebagai pusat pertumbuhan daerah bagian barat dan Propinsi DIY.

E. Jenis Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo yaitu :

1. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) yang meliputi layanan mandiri, layanan berbantu dan layanan prioritas.
2. Pelayanan perizinan Non OSS yang meliputi :
 - a. Izin reklame
 - b. Izin penelitian
 - c. Izin praktek perawat
 - d. Izin praktek bidan
 - e. Izin optik
 - f. Izin praktek fisiotherapis
 - g. Izin operasional laboratorium
 - h. Izin unit tranfusi darah
 - i. Izin operasional puskesmas
 - j. Izin pemberantasan hama (pest control)

- k. Izin praktek dokter hewan
- l. Izin tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagai paramedik veteriner
- m. Izin tenaga kesehatan warga negara asing
- n. Izin pelayanan jasa medik veteriner
- o. IMB